

**PERAN PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI ERA DIGITAL**

**Jeandira Amelia Sudrajat\*1, Khairunnisa Ramadhani2, Khafiel Ramadhan Putra Riyano3, Herli Antoni4**

Universitas Pakuan, Kota Bogor  
Jl. Pakuan P.O BOX 452, Bogor 16143  
Email: [herli.antoni@unpak.ac.id](mailto:herli.antoni@unpak.ac.id)

*Abstrak*

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang krusial dalam mewujudkan keadilan sosial, terutama di tengah perkembangan era digital yang pesat. Dalam konteks ini, sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menjadi landasan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang dalam masyarakat digital. Artikel ini membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan kesenjangan digital, mempromosikan partisipasi ekonomi yang inklusif, serta menjaga etika dan moralitas dalam interaksi sosial di dunia maya. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijaksana dan adil, serta mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial, Indonesia dapat menghadapi tantangan global sambil tetap mempertahankan jati diri sebagai bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi Pancasila dalam konteks modern dan kontribusinya terhadap pencapaian keadilan sosial di era digital.

**Kata Kunci:** Pancasila, Keadilan Sosial, Era Digital

**Article History**

Received: Desember 2024  
Reviewed: Desember 2024  
Published: Desember 2024  
Plagiarism Checker No 234  
Prefix DOI: Prefix DOI:  
10.8734/Sindoro.v1i2.365

**Copyright: Author**  
**Publish by: Departemen Ilmu Pendidikan, Cahaya Ilmu Bangsa, Sindoro, Jurnal Pendidikan**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ISSN 3025-6488



**PENDAHULUAN**

Era digital merupakan era dimana digitalisasi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Era ini ditandai dengan akses informasi yang cepat dan mudah. Pesatnya evolusi teknologi membawa banyak perubahan penting. (Harry Saptarianto et al., 2024)

Era digital merupakan suatu masa di mana sebagian besar masyarakat pada era tersebut menggunakan sistem digital dalam kehidupan sehari-harinya. (Harry Saptarianto et al., 2024)

Di era transformasi digital yang terus berkembang, pentingnya menghayati nilai-nilai Pancasila menjadi landasan terpenting dalam menjaga jati diri bangsa Indonesia. Meskipun teknologi membawa berbagai manfaat dengan mempermudah akses terhadap informasi, masyarakat masih menghadapi tantangan besar dalam menyaring informasi yang akurat, dan dampak teknologi dan digital telah menyebabkan perubahan nilai-nilai budaya Indonesia yang berpotensi menimbulkan penyimpangan atau perubahan yang merugikan. dan moralitas yang berpotensi membahayakan. (Syahputra1 et al., 2023)

Dalam perkembangan saat ini, perdebatan tentang prinsip-prinsip dasar keadilan sosial menemukan tantangan di era digital atau ranah digital. Hal ini karena hal ini berkaitan dengan masalah etika yang sering kali dihalangi oleh teknologi berskala besar dalam konteks global. (Lachapelle, 2005)

Meskipun tidak ada definisi yang seragam tentang keadilan sosial, keadilan sosial di ranah digital dicapai melalui akses yang memungkinkan masyarakat menikmati hak-hak digital mereka dan menerima perlindungan yang terjamin. Transformasi digital, terutama di era

pemanfaatan kecerdasan buatan, tentu saja menimbulkan disrupsi yang luar biasa, sehingga keberadaannya menjadi hambatan besar baik bagi tujuan etis transformasi masyarakat maupun akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. dapat digunakan dalam berbagai cara untuk tujuan berikut: Era digital dunia membawa serta ancaman unik bagi masyarakat. (Barfield, W., & Pagallo, 2018)

Ketimpangan sosial mungkin terjadi di masyarakat sehubungan dengan penggunaan teknologi digital. Di era digital, muncul kelompok "miskin" dan "kaya". Istilah "miskin" mengacu pada mereka yang kurang mampu memanfaatkan teknologi di era digital, dan "kaya" mengacu pada sebaliknya. Faktor yang menentukan seberapa jauh keterbelakangan masyarakat dalam menggunakan teknologi adalah lokasi, umur, dan pendapatan.

Salah satu tantangan yang kita hadapi saat ini adalah penyelesaian masalah kesenjangan sosial. Akses universal memerlukan penyedia infrastruktur alternatif, jenis pembiayaan dan model bisnis baru, perubahan kebijakan, pengembangan keterampilan digital dalam skala besar, dan peningkatan konten yang relevan secara lokal. Masyarakat harus bersatu untuk membangun komunitas dan alat yang diperlukan untuk memberikan akses yang bermakna, stabil, dan adil bagi semua.

Karena kehidupan sehari-hari manusia berhubungan erat dengan Internet, maka kesetaraan dan hak asasi manusia juga harus tertanam dalam kehidupan Internet. Namun keputusan tentang bagaimana pengguna ingin menjalani kehidupan online mereka kini dibuat oleh sekelompok perusahaan besar terpilih. Situasi itu harus berubah jika keadilan ingin dicapai. Pengguna harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di semua tingkatan sehingga realitas dan hak mereka diperhitungkan.

Tujuan pembuatan jurnal ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-5 tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat diimplementasikan dalam konteks era digital. Jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul akibat transformasi digital serta memberikan solusi berbasis nilai-nilai Pancasila. Selain itu, jurnal ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat dan pemangku kebijakan tentang pentingnya keadilan sosial di tengah perkembangan teknologi informasi. Dengan adanya jurnal ini, diharapkan tercipta rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung tercapainya keadilan sosial yang inklusif dan berkelanjutan di era digital.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **Pancasila sebagai Dasar Negara**

Pancasila, yang berasal dari bahasa Sansekerta dan berarti "lima asas", merupakan dasar ideologi negara dan resmi Indonesia. Lima sila Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila diakui sebagai landasan prinsip dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah oleh lembaga manapun. Pancasila mempunyai beberapa fungsi penting dalam konteks bernegara. Pertama, Pancasila sebagai ideologi negara menjadi pedoman bagi seluruh kebijakan pemerintah dan

lembaga negara. Apalagi Pancasila juga menjadi penghubung kegiatan sosial budaya di Indonesia. Kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan pedoman moral dan etika bagi individu dan masyarakat serta mengedepankan rasa saling menghormati dan toleransi antar warga negara. Ketiga, Pancasila berfungsi sebagai simbol persatuan yang mempersatukan keberagaman suku, agama, dan budaya Indonesia, agama, dan budaya di Indonesia.

## **3. Tujuan Pancasila**

Tujuan utama penerapan Pancasila adalah membangun masyarakat adil dan makmur. Hal ini tercermin dalam seluruh prinsip yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan dalam keberagaman. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya menjadi landasan hukum tetapi juga falsafah hidup yang harus diinternalisasikan oleh setiap warga negara. (Fitriono, 2022)

#### 4. Nilai-nilai Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Yudi Latif, Pancasila terdiri dari lima nilai dasar: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang harus diinternalisasi oleh setiap warga negara. (Unggul et al., 2020)

Dalam konteks implementasinya, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting untuk menjaga keselarasan antara hak dan kewajiban masyarakat. Sebagai contoh, sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" mengajak masyarakat untuk menghormati kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sementara itu, sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" menekankan perlunya sikap empati dan keadilan dalam interaksi sosial. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, diharapkan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menghormati. (Fitriano, 2022)

Penerapan nilai-nilai Pancasila juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat karakter bangsa. Dalam pendidikan karakter berbasis Pancasila, generasi muda diajarkan untuk memiliki sikap toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Hal ini penting agar mereka dapat menjadi warga

negara yang baik dan bertanggung jawab di masa depan. (Rahman et al., 2022) Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sekadar dokumen formal, tetapi juga merupakan panduan hidup yang relevan untuk menghadapi tantangan zaman. (Latif, 2015)

#### 5. Definisi Keadilan Sosial

Menurut John Rawls dalam alam karyanya "A Theory of Justice," Rawls mendefinisikan keadilan sosial sebagai prinsip yang memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar dan bahwa ketidaksetaraan sosial hanya dapat diterima jika memberikan manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung di masyarakat. Ia menekankan pentingnya prinsip "difference principle" untuk mencapai keadilan distributif. (Mawardi, 2010)

Menurut Amartya Sen berargumen bahwa keadilan sosial harus dilihat dari sudut pandang kemampuan (capability) individu untuk mencapai kehidupan yang mereka nilai baik. Menurutnya, keadilan tidak hanya berkaitan dengan distribusi sumber daya, tetapi juga dengan kesempatan dan kebebasan individu untuk berkembang. (Andrianni & Rianto, 2019)

Menurut Gustav Radbru menekankan bahwa keadilan sosial mencakup perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan di hadapan hukum. Ia berpendapat bahwa keadilan sosial harus menjadi landasan bagi struktur hukum dan kebijakan publik. (Suliantoro & Runggandini, 2018)

#### 6. Keadilan Sosial dalam Pancasila

Pancasila sebagai ideologi negara berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret dan operasional aplikatif, sehingga tidak hanya dijadikan slogan belaka. (Suryanto & Adon, 2023)

Keadilan sebagai salah satu asas dalam Pancasila merupakan salah satu cita-cita bangsa yang harus terus dijunjung tinggi sama seperti keempat asas lainnya. Cita-cita bangsa dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyatnya menjadi sebuah tujuan yang padazaman ini semakin sulit untuk dilaksanakan. Sebab, ketidakadilan sosial semakin sering terjadi di Indonesia akhir-akhir ini salah satunya ialah sikap dan tindakan intoleransi terhadap perbedaan yang ada baik agama, suku, dan ras.

Menyadari hal itu maka perlu sebuah usaha yakni memberikan pemahaman yang mendidik seluruh rakyat untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan di tengah-tengah kehidupan Bangsa Indonesia yang beragam. Keadilan sosial harus sungguh-sungguh dirasakan masyarakat sebagai sebuah prinsip yang mutlak dan tidak dapat dilanggar begitu saja.

Radikalisme, rasisme, dan diskriminasi harus dihindari dan dilawan sebagai penyakit yang merusak citra dan etika Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pendidikan terhadap prinsip keadilan

dalam Ideologi Pancasila menjadi sebuah kewajiban yang harus terus dijalankan terutama bagi kaum muda demi menciptakan masyarakat yang lebih beretika dan menjunjung tinggi kesatuan bangsa.

Menurut Soekarno, Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu dari lima sila dalam Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Dalam sila kelima tersebut, mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Sila ini menegaskan pentingnya terciptanya keadilan sosial bagi setiap individu di Indonesia, tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, agama, suku, atau budaya.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sila ini menjamin kesetaraan bagi seluruh warga negara tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Setiap individu memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesempatan dan perlakuan yang adil, baik dalam aspek pendidikan, pekerjaan, hingga layanan publik. Dengan adanya prinsip kesetaraan ini, kesenjangan sosial dapat dikurangi secara bertahap. Perbedaan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi diupayakan agar tidak lagi menjadi masalah yang menghambat kemajuan bangsa. Seluruh rakyat Indonesia berhak menikmati kesejahteraan secara merata, tanpa ada kelompok yang merasa terpinggirkan.

Sila ini juga berperan dalam memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Kelompok-kelompok ini sering kali menghadapi ketidakadilan sosial, baik dalam bentuk perlakuan diskriminatif, kekerasan, maupun pengabaian hak-hak mereka. Oleh karena itu, sila keadilan sosial memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus dari pemerintah serta masyarakat. Dalam konteks ini, program-program bantuan sosial dan perlindungan hukum diciptakan untuk menghindari ketidakadilan yang berpotensi dialami oleh kelompok rentan.

Tidak hanya itu, sila ini juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep kesejahteraan umum meliputi terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara merata. Setiap warga negara diharapkan

dapat hidup layak dan sejahtera tanpa terkecuali. Selain itu, sila keadilan sosial juga mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan nasional. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga pada pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan pemerintah. Partisipasi ini menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara seluruh lapisan masyarakat, sehingga terbentuk sinergi dalam upaya membangun bangsa.

Terakhir, sila keadilan sosial memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan hukum. Dalam hal ini, setiap individu berhak diperlakukan secara adil di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kekuasaan. Prinsip ini mencegah terjadinya diskriminasi hukum yang sering kali merugikan kelompok lemah atau miskin. Melalui kehadiran lembaga peradilan yang adil dan tidak memihak, keadilan hukum dapat diwujudkan. Oleh karena itu, peran sila keadilan sosial tidak hanya sebatas konsep, tetapi juga diterapkan dalam berbagai kebijakan dan regulasi nasional. Dengan penerapan yang konsisten, sila keadilan sosial dapat menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan, lebih sejahtera, dan lebih bersatu di bawah nilai-nilai Pancasila.

## **7. Definisi era digital**

Era digital merupakan masa di mana informasi dapat dengan mudah ditemukan dan dibagikan melalui media digital. Istilah "digital" berasal dari bahasa Yunani "digitus," yang berarti jari, dan dalam konteks ini merujuk pada sistem angka biner (0 dan 1) yang menjadi dasar komunikasi digital. Era ini dimulai pada tahun 1980-an dengan kemunculan internet secara publik, yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan memperoleh informasi. (Mossberger, 2019)

Menurut Aagaard, era digital adalah tren global yang berkembang di berbagai sektor industri, di mana akses informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Digitalisasi ini membawa perubahan signifikan dalam cara kerja berbagai sektor seperti media, perbankan, dan telekomunikasi, yang beralih dari sistem manual ke sistem otomatis berbasis computer. (Sari & Diana, 2024)

Menurut Rahayu mendefinisikan era digital sebagai zaman di mana semua aspek kehidupan masyarakat menggunakan sistem digital yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi. Era ini membuka peluang besar untuk inovasi dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan perdagangan, serta mempengaruhi perkembangan karakter generasi muda. (Janatin & Kurnia, 2022)

Menurut Frederickson menekankan bahwa era digital merupakan fase di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Media baru yang muncul dalam era ini memiliki karakteristik dapat dimanipulasi dan bersifat jaringan, sehingga memudahkan masyarakat dalam menerima informasi dengan cepat. (Budiyono, 2020)

### **8. Perkembangan era digital**

Era digital adalah suatu masa di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Dalam era ini, informasi dapat diakses dan disebarluaskan dengan cepat melalui berbagai perangkat digital seperti komputer, smartphone, dan tablet. Perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Era transformasi digital ini juga membuka peluang besar dalam dunia bisnis, pendidikan, dan kehidupan sosial, namun di sisi lain, juga menimbulkan tantangan yang tidak bisa diabaikan.

Dampak dari perkembangan era digital sangat signifikan dan menyentuh berbagai aspek kehidupan. Di bidang ekonomi, digitalisasi telah mengubah model bisnis tradisional menjadi lebih efisien dan inovatif. Misalnya, munculnya platform e-commerce seperti Tokopedia dan Bukalapak telah memudahkan transaksi dan memperluas pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu, era digital juga meningkatkan akses terhadap informasi dan layanan keuangan melalui aplikasi perbankan yang memungkinkan transaksi secara online

Dalam konteks sosial dan budaya, era digital telah mengubah cara komunikasi antarindividu. Komunikasi yang sebelumnya bergantung pada tatap muka kini banyak dilakukan melalui aplikasi pesan instan dan media sosial. Hal ini mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat, di mana hubungan antarindividu menjadi lebih cepat namun terkadang kurang mendalam. (Mauliddiyah, 2021)

Namun, perkembangan era digital juga membawa tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital yang masih ada di Indonesia, di mana tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Selain itu, penyebaran informasi yang cepat juga meningkatkan risiko terhadap berita palsu atau disinformasi yang dapat memengaruhi opini publik.

### **Pembahasan**

#### **9. Peran Pancasila dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di era Digital**

Pancasila ditetapkan sebagai dasar filosofis negara Indonesia, di sahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dimasukkan ke dalam Pembukaan UUD 1945. Karena perjalanan sejarahnya, keberadaan Pancasila sebagai dasar negara memiliki berbagai interpretasi dan kepentingan politik atas urgensi dan ketegasan otoritas penguasa di balik jubah Pancasila sebagai dasar negara yang diduga disalahgunakan (Sulaiman, 2015). Menurut (Suroso, 2015) Pancasila lahir dari benturan dua ideologi besar dan kemudian merajai dunia. Layaknya bayi baru lahir dari kandungan sang ibu, Pancasila harus menghadap pada dua monster yang sudah memiliki segalanya: resistensi, amunisi, modal, dan satuan pengamanan atau tentara. Namun, bayi Pancasila ini tumbuh besar setelahnya dan akhirnya tumbuh dewasa. Dan itu mulai dipertimbangkan dalam bidang idealism di dunia. Kedua idealisme tersebut adalah kapitalisme dan sosialisme, dua idealism yang saling bertentangan kekuatan. (Sidabutar et al., 2023)

Nilai-nilai Pancasila mulai tergerus seiring dengan perkembangan era digital, berbagai cara dilakukan oleh masyarakat untuk mempermudah akses informasi dan memanfaatkan teknologi

secara bebas. Dengan hal ini tentunya ada sisi negative yang bisa memunculkan ancaman kejahatan, di dorong oleh perilaku yang tidak normative yang bisa melukai semangat generasi muda. Informasi-informasi palsu bisa menyerang berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, politik, bahkan kehidupan sosial yang bisa menggiring kita semua terhadap suatu polarisasi. Sebagai generasi muda kita harus lebih berhati-hati dan lebih cermat dalam menggunakan teknologi digital agar tidak membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa, meneguhkan nilai-nilai Pancasila adalah salah satu caranya. Kehadiran Pancasila bisa menjadi jembatan emas bagi generasi muda untuk membangun batasan dari apa yang bisa diterima dari pengaruh eksternal yang berbahaya dan tidak etis.

Di sisi lain dari perkembangan teknologi digital juga membawa dampak baik untuk para generasi muda, yang mana sebagai generasi muda kami jadi mempunyai banyak akses terhadap suatu informasi. Ini akan membawa kepada kemajuan terhadap suatu bangsa itu sendiri untuk sebuah pemerataan dalam mewujudkan nilai keadilan sosial. Dengan perkembangan teknologi digital kita bisa dengan mudah menjangkau suatu wilayah, karena disinilah peran Pancasila dalam mewujudkan keadilan sosialnya di era digital, agar orang-orang atau wilayah-wilayah yang berada di daerah terpencil bisa terakses dan terpantau oleh pemerintah sehingga ini akan membantu dan menjadi bukti bahwa kami sebagai putra putri bangsa sedang berupaya berpedoman kepada Pancasila untuk mewujudkan suatu nilai didalamnya.

#### **10. Contoh Studi Kasus Kesenjangan Digital**

Kesenjangan selalu menjadi masalah di kehidupan sosial kita, ini disebabkan karena pemerataan belum berjalan baik di suatu negara. Selain kesenjangan sosial yang sering kita dengar muncul istilah baru yaitu kesenjangan digital, kesenjangan digital adalah sebuah perbedaan pemahaman dan perilaku seseorang terhadap teknologi. Kesenjangan digital juga menyebabkan adanya ketimpangan dalam menikmati manfaat dari teknologi seperti Kesehatan, Pendidikan, maupun akses ekonomi. Ini banyak terjadi di beberapa wilayah Indonesia khususnya antara daerah pedesaan dan perkotaan, yang mana masyarakat di pedesaan tidak bisa merasakan kualitas Pendidikan, Kesehatan maupun ekonomi yang didapat oleh orang-orang yang tinggal di perkotaan. Ini sangat bertentangan dengan sila ke-5 "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" sehingga masyarakat yang tinggal di pedesaan tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Kita bisa lihat contoh masyarakat yang tinggal di Papua dengan yang tinggal di Ibukota, gap nya sangat jauh sekali karena masyarakat di Papua sangat jauh dari peradaban teknologi. Sebagai generasi penerus kita harus peduli antar sesama bangsa bahwa "Keadilan Sosial" harus terlaksana dengan baik.

#### **11. Solusi Dalam Kesenjangan Digital yang Mempengaruhi Keadilan Sosial**

Dalam contoh studi kasus yang telah dibahas bisa disimpulkan bahwa ketimpangan bisa disebabkan karena faktor demografi, latar belakang sosial ekonomi, dan pengalaman serta kompetensi teknologi informasi. Beberapa hal yang bisa menyebabkan ketimpangan digital antara lain:

1. Tidak meratanya ekonomi masyarakat.
  2. Tingkat pendidikan yang rendah.
  3. Menganggap teknologi informasi hanyalah sebagai entertainment/hiburan semata.
  4. Semakin tua usia masyarakat semakin kecil kemungkinan mereka untuk terlibat secara digital.
- Jika permasalahan tersebut dibiarkan, maka akan berdampak negatif jika informasi informasi melalui media digital tidak di filterisasi oleh masyarakat. Dengan itu perlu adanya prinsip keadilan sosial juga ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, yang menyebutkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah "mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk menciptakan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu solusi yang diterapkan bagi pemerintah maupun masyarakat:

1. Mengembangkan keterampilan digital  
Masyarakat perlu mengambil langkah untuk mengikuti program pelatihan dan pendidikan digital yang dapat membantu mempelajari keterampilan baru dan memahami teknologi yang

ada. Contohnya seperti mengikuti program pelatihan “Indonesia Makin Cakap Digital” yang telah disediakan oleh Kementerian Kominfo.

#### 2. Meningkatkan literasi digital

Literasi adalah kunci untuk menggunakan teknologi dengan bijaksana. Masyarakat perlu memahami bagaimana menggunakan perangkat digital, mengelola informasi secara efektif, dan memahami etika online.

#### 3. Masyarakat perlu belajar tentang perlindungan data pribadi

Hal ini dilakukan untuk menghindari penipuan online akibat dari tidak terlindunginya data-data pribadi yang disimpan di dunia digital. Masyarakat perlu mengetahui langkah-langkah keamanan yang diperlukan dan hal lain terkait dengan kejahatan dunia siber.

#### 4. Meningkatkan infrastruktur jaringan internet

Pemerintah dapat meningkatkan infrastruktur digital untuk memperluas akses digital, seperti dengan meluncurkan satelit untuk meningkatkan kualitas sinyal dan memperluas cakupan di daerah yang belum terjangkau.

#### 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang etika digital

Mengenai nilai, prinsip, dan norma yang mengatur perilaku dan interaksi seseorang di dunia digital. Hal ini dibutuhkan untuk kenyamanan seseorang dalam dunia digital.

#### 6. Penyediaan konten digital yang berkualitas

Memahami konsekuensi jika mengunggah konten yang dapat merugikan orang lain, baik itu privasi seseorang maupun nama baik seseorang dan suatu instansi.

Perlu adanya strategi dalam mengelola dampak globalisasi dan teknologi digital dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah dan masyarakat dapat mengadopsi berbagai strategi. Ini termasuk pemahaman tentang dinamika global dan teknologi, yang memperkuat keamanan dan privasi data, serta promosi dialog lintas budaya untuk membangun pemahaman dan toleransi yang lebih besar di antara masyarakat yang beragam. (Jasmine, 2014)

### **12. Tantangan Peran Pancasila dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Era Digital**

Kemajuan teknologi pada era digital telah membawa berbagai perubahan bagi masyarakat dikarenakan adanya kemudahan untuk mengakses berbagai informasi tanpa batas. Kemajuan teknologi tidak bisa dihindari lagi dikarenakan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Masyarakat Indonesia sejak dulu sudah terbiasa hidup rukun berdampingan walau beda suku, ras, agama. Namun dampak dari input informasi yang dibawa pada era globalisasi dan digitalisasi saat ini telah memberikan perubahan signifikan di lingkungan masyarakat. Revolusi dari teknologi ini selain memberikan kemudahan juga membawa tantangan dan resiko terhadap Pancasila semakin kompleks. Kemudahan teknologi membuat semua orang memilih untuk mencari informasi dari internet. Seperti yang kita ketahui, tidak semua informasi di internet itu terbukti kebenarannya dan masih rawan berita hoax. Adapun beberapa resiko dan tantangan antara lain:

#### 1. Perubahan nilai dan norma sosial

Zaman dan teknologi telah merubah pola dan system kehidupan sosial masyarakat saat ini. Pertumbuhan teknologi yang signifikan secara eksplisit akan membawa dampak yang begitu besar terhadap kehidupan manusia di masa ini. Dengan maraknya media sosial dan alat komunikasi digital yang serba efektif dan efisien menjadi salah satu faktor lahirnya manusia yang individual dan egois bahkan cenderung melakukan hal-hal yang lebih pragmatis dalam berinteraksi sosial. Selain itu, dengan teknologi yang dapat mempercepat komunikasi antar individu dapat menyebabkan berkurangnya masyarakat sosial yang disebabkan oleh tidak percaya dengan lingkungan sendiri (Syarifuddin, 2022).

#### 2. Penyebaran informasi palsu atau hoax

Kemudahan dan kecepatan penyebaran informasi juga bisa memberikan dampak negative bagi masyarakat, salah satunya adalah maraknya informasi palsu atau hoaks. Kecepatan penyebaran informasi saat ini membuat masyarakat kurang bisa menyaring antara fakta atau hoaks. Padahal, hoaks ini sudah melanggar nilai-nilai Pancasila. Dengan menyebarkan hoax, seseorang telah mengabaikan kedudukannya sebagai makhluk Tuhan, di mana moral dan tanggung jawab melekat padanya. Dalam etika, seharusnya kebebasan diiringi dengan tanggung jawab, tetapi

mereka mengabaikan hal itu. Oleh karena itu, wajar saja UU ITE disahkan agar penyelewengan hakikat diri manusia menurut Pancasila tidak lagi terjadi (Faqihuddin, 2018).

### 3. Kesenjangan digital

Tidak semua orang mempunyai akses atau keterampilan yang sama untuk mengakses teknologi. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial, dan bertentangan dengan semangat keadilan sosial Pancasila. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa menjadikan Pancasila sebagai faktor internal dalam perkembangannya. Segala perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menghormati harkat dan martabat manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan untuk tujuan pembangunan manusia dan didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus terbuka karena perkembangannya berkaitan erat dan berdampak langsung pada kehidupan manusia (Rizky Rega Ayu Jayanti, 2022).

### 4. Ketergantungan terhadap teknologi asing

Ketergantungan pada teknologi asing menimbulkan potensi ancaman serius terhadap kedaulatan dan kemerdekaan negara. Hal ini bisa berdampak besar bagi kelangsungan hidup Pancasila, khususnya di bidang politik dan ekonomi. Ketika suatu negara terlalu bergantung pada teknologi dan perangkat keras yang diimpor, hal ini dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi yang signifikan. Industri dalam negeri bisa tergerus dan pertumbuhan ekonomi nasional bisa terhambat. Selain itu, ketergantungan terhadap teknologi luar negeri juga membuka pintu masuknya pengaruh besar pihak luar terhadap politik dalam negeri. Negara-negara mungkin terjebak dalam pengambilan keputusan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan nasional, terutama dalam hal regulasi dan standar teknologi. Selain itu, kemungkinan terjadinya krisis keamanan teknologi menjadi risiko yang perlu diperhatikan. Jika terjadi konflik atau krisis dengan negara penyedia teknologi, ketergantungan ini dapat mengganggu operasional dan keamanan nasional. Oleh karena itu, mengurangi ketergantungan terhadap teknologi asing sekaligus memperkuat kapasitas teknologi dalam negeri merupakan langkah penting untuk memastikan negara dapat menjaga kedaulatan dan kemandirian dalam mengelola aspek politik dan ekonomi sesuai sila Pancasila.

### 5. Pelanggaran privasi dan keamanan data

Pelanggaran privasi dan keamanan data merupakan tantangan serius terhadap hak-hak individu dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Pancasila menekankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, melindungi privasi dan keamanan data merupakan aspek penting dalam menjaga nilai-nilai tersebut. Ketika privasi dan keamanan data dilanggar, itu berarti hak seseorang untuk melindungi informasi pribadinya terancam. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui dalam Pancasila yang menekankan bahwa setiap individu berhak atas penghormatan dan perlindungan dalam kehidupan dan martabatnya. Selain itu, pelanggaran privasi dan keamanan data juga dapat mempengaruhi keadilan. Informasi yang diungkapkan atau disalahgunakan dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama jika data digunakan untuk tujuan diskriminatif atau menguntungkan pihak tertentu secara tidak adil. (Aisyah & Najicha, 2023)

Dalam konteks keamanan data, Pancasila menekankan pada perlindungan masyarakat dari segala bentuk ancaman atau bahaya. Oleh karena itu, Ketika keamanan data tidak berjalan dengan baik maka akan mengancam kesejahteraan masyarakat. Pancasila juga menekankan prinsip gotong royong, Dimana masyarakat diharapkan membantu serta melindungi satu sama lain. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antarindividu, pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan data terlindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, melindungi privasi dan keamanan data tidak hanya menjadi kebutuhan teknologi semata tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Langkah-langkah keamanan data, kebijakan privasi yang ketat serta sistem keamanan yang kuat, merupakan implementasi dari nilai Pancasila yang melindungi hak setiap individu, kesejahteraan masyarakat dan juga untuk menjunjung tinggi nilai Keadilan Sosial.

## 13. Solusi Dari Tantangan peran Pancasila Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Era Digital

Teknologi membawa dampak bagi seluruh lapisan masyarakat. Bagi pisau bermata dua, teknologi membawa dampak positif dan juga negatif. Dampak positif nya membuat masyarakat jadi lebih mudah dalam melakukan sesuatu di hampir seluruh aspek kehidupannya seperti berinteraksi maupun berkomunikasi, serta mengakses informasi dengan waktu yang cepat. Sedangkan dampak negative yang diberikan pun tidak sedikit, seperti perubahan nilai sosial dan etika masyarakat, penyebaran informasi palsu atau hoax, kesenjangan digital, ketergantungan sosial, pelanggaran privasi dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, diperlukan Solusi yang efektif agar Pancasila tetap eksis di era globalisasi ini. Adapun Solusi itu antara lain:

#### 1. Melalui Pendidikan formal dan Literasi Digital

Pembelajaran dari pendidikan kewarganegaraan merupakan pembelajaran pada semua jenjang pendidikan sebagai salah satu cabang Pendidikan formal di Indonesia yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia khususnya dalam membangun kepribadian generasi muda. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga keterampilan dan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan juga merupakan salah satu alat untuk membentuk karakter bangsa. Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman untuk seluruh masyarakat Indonesia dalam bertindak dan berperilaku baik dalam kehidupan sosial nyata maupun sosial media (Kirani & Najicha, 2022). Selain itu, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Sumber daya digital, platform pembelajaran interaktif, dan aplikasi pendidikan dapat dijadikan sarana penunjang pembelajaran nilai-nilai Pancasila. Pelatihan dan penyiapan guru dan tenaga kependidikan juga penting untuk menjamin pengajaran Pancasila efektif. Mereka hendaknya memahami metode pengajaran dan strategi pembelajaran yang dapat memperkuat pemahaman siswa terhadap Pancasila. Terakhir, kemitraan dengan orang tua dan masyarakat menjadi penting. Melibatkan mereka dalam pendidikan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan budaya dan sosial dapat memperkuat pemahaman siswa dan memastikan nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, pendidikan formal dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat kelangsungan hidup Pancasila di era globalisasi.

#### 2. Melalui Media Sosial

Menumbuhkan eksistensi Pancasila melalui media sosial memerlukan pendekatan yang tepat. Pertama, penting untuk mensosialisasikan konten pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Kampanye edukasi, infografis, dan konten visual dapat menjadi cara efektif untuk memperkuat pemahaman terhadap sila Pancasila. Selain itu, pemantauan dan respons terhadap konten terkait Pancasila juga penting untuk mencegah penyebaran misinformasi atau hoaks. Dengan memberikan informasi yang jelas dan terverifikasi, serta menyebarkan informasi yang akurat melalui platform media sosial, eksistensi Pancasila dapat diperkuat di tengah masuknya informasi digital yang dinamis. (Aisyah & Najicha, 2023)

### 14. Simpulan

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial, terutama di era digital yang berkembang pesat. Jurnal ini Mengkaji bagaimana nilai nilai Pancasila dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan kesenjangan digital, mempromosikan partisipasi yang inklusif, serta menjaga etika dalam interaksi sosial di dunia maya. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijaksana dan adil,

Indonesia dalam menghadapi tantangan global sambil tetap mempertahankan identitasnya sebagai bangsa yang berlandaskan pada nilai nilai luhur Pancasila.

- Peran Pancasila: Pancasila, sebagai ideologi negara, berfungsi sebagai panduan dalam mencapai keadilan sosial dan moralitas di era digital.
- Keadilan Sosial: Sila kelima Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjamin akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang.

- Tantangan Digital: Era digital membawa tantangan berupa kesenjangan akses teknologi, yang perlu diatasi untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi secara adil.
  - Pendidikan dan Kesadaran: Pendidikan nilai-nilai Pancasila harus ditingkatkan untuk membangun pemahaman tentang pentingnya keadilan sosial dan etika dalam penggunaan teknologi.
  - Rekomendasi Kebijakan: Diperlukan rekomendasi kebijakan berbasis nilai-nilai Pancasila untuk mendukung keadilan sosial yang inklusif dan berkelanjutan di era digital.
- Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks modern sangat penting untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera di tengah perkembangan teknologi informasi.

### Daftar Referensi

- Aisyah, F. N., & Najicha, F. U. (2023). *Peran Pancasila di Era Digital dalam Mewujudkan Penggunaan Teknologi yang Bertanggung Jawab dan Beretika*. Research Gate, December.
- Andrianni, S., & Rianto, H. (2019). *Analisis Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Untuk Mengembangkan Sikap Keadilan Di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 166. <https://doi.org/10.31571/pkn.v3i2.1439>
- Barfield, W., & Pagallo, U. (Eds.). (2018). *Research Handbook on Sustainability Reporting How To Order Connect With Us Read our Blog Th oughful Independent Publishing*. 2041703.
- Budiyono, S. (2020). *Pengajaran Bahasa dan Sastra di Era Digital (Era Digital, Era Masyarakat Global)*. *Lingua Franca:Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajaran* , 4(1), 1–8. <https://journal.um-surabaya.ac.id/lingua/article/view/4315>
- Fitriyono, R. . (2022). *Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi I, April-Mei 2022*. 9(November).
- Harry Saptarianto, Shelvi Deviani, Syamas Isti Anah, & Indah Noviyanti. (2024). *Menghadapi Tantangan Era Digital, Strategi Integrasi Media Sosial, Literasi Digital dan Inovasi Bisnis*. *Jurnal Manuhara : Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 128–139. <https://doi.org/10.61132/manuhara.v2i3.955>
- Janatin, R. P., & Kurnia, M. D. (2022). *Upaya Pengembangan Karakter pada Generasi Muda di Era Digital*. *Jubah Raja (Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajaran)*, 1(2), 109–115. <https://www.ejurnal.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/JR/article/view/2885>
- Jasmine, K. (2014). *IMPLEMENTASI SILA KE-5 PANCASILA DALAM MENYIKAPI KETIMPANGAN DIGITAL DI ERA GLOBALISASI*. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 3(4), 5121–5125.
- Lachapelle, E. (2005). *Morality, ethics, and globalization: Lessons from Kant, Hegel, Rawls, and Habermas*. *Perspectives on Global Development and Technology*, 4(3), 603–644. <https://doi.org/10.1163/156915005775093296>
- Latif, Y. (2015). *Reaktualisasi Pancasila*. 1–28. [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_197\\_Reaktualisasi Pancasila \(Yudi Latif\).pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_197_Reaktualisasi_Pancasila_(Yudi_Latif).pdf)
- Mauliddiyah, N. L. (2021). *BAB I PENDAHULUAN*. 6.
- Mawardi. (2010). *Keadilan Sosial Menurut John Rawls*. [epository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4263/1/MAWARDI-FUH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4263/1/MAWARDI-FUH.pdf)
- Mossberger, K. & C. J. T. (2019). *Digital Citizenship: The Internet, Society, and Partisipation*. 9–24.
- Rahman, A., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). *Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan*. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–8.
- Sari, J. A., & Diana, B. A. (2024). *Dampak Transformasi Digitalisasi terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Pedesaan*. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(2), 88–96. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i2.3896>

- Sidabutar, Y., Lestari, D., Istiara, S., Permadi, W. W., Calista, A., Paul, I., Faris, M., & Azzahra, D. P. (2023). Tantangan Dan Peluang Pancasila Sebagai Ideologi Negara Di Era Digital Pada Kehidupan Mahasiswa. *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 7(4), 225–231.
- Suliantoro, B. W., & Runggandini, C. W. M. (2018). Konsep keadilan sosial dalam kebhinekaan menurut pemikiran Karen J. Warren. *Jurnal Respons Universitas Katholik Atma Jaya*, 23(01), 39–58. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/979681>
- Suryanto, F. R., & Adon, M. J. (2023). Konsep Keadilan Sosial Dalam Sila Pancasila Sebagai Upaya Mengatasi Intoleransi di Indonesia Menurut Soekarno. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(6), 185–190. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i6.1655>
- Syahputra1, A., Majid Fadhillah, M., Prasetya, G., Pradana, A., Prio, A., & Santoso, A. (2023). Penerapan Pancasila Di Dalam Era Digital. *Seminar Nasioanl & Call For Paper Hubisintek*, 816–827.
- Unggul, A., Ajati, D., Saputra, R., & Fitriyono, R. (2020). Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, 1(Pancasila), 1–12. <http://satujam.com/pancasila-dan-lambangnya/>
- Website:
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2022). Pancasila sebagai dasar negara: Makna, arti, dan fungsi. Diperoleh dari <https://pasla.jambiprov.go.id/pancasila-sebagai-dasar-negara-makna-arti-dan-fungsi/>.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (n.d.). Peran sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diperoleh dari <https://fahum.umsu.ac.id/peran-sila-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia/>.
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (n.d.). Pancasila sebagai dasar negara. Diperoleh dari <https://fkip.umsu.ac.id/pengertian-pancasila-sebagai-dasar-negara/>.
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (n.d.). Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Diperoleh dari <https://fkip.umsu.ac.id/pancasila-sebagai-pandangan-hidup-dan-dasar-negara/>.
- Gramedia. (n.d.). Era digital: Transformasi dan tantangan. Diperoleh dari <https://www.gramedia.com/literasi/era-digital/>.
- Hukum Online. (2022). Pancasila sebagai dasar negara. Diperoleh dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pancasila-sebagai-dasar-negara-t61f23142a7e13/>.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (n.d.). Transformasi digital: Tren dan tantangan di era teknologi informasi. Diperoleh dari <https://lan.go.id/?p=12800>.
- Student Activity Binus. (2021). Statistika: Analisis regresi. Diperoleh dari <https://student-activity.binus.ac.id/himstat/2021/12/21a37/>.
- Telkom University. (n.d.). Transformasi digital: Tren dan tantangan di era teknologi informasi. Diperoleh dari <https://bit.telkomuniversity.ac.id/transformasi-digital-tren-dan-tantangan-di-era-teknologi-informasi/>.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo. (n.d.). Makna dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Diperoleh dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/makna-dan-kedudukan-pancasila-sebagai-dasar-negara>.